

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PPDB SMP NEGERI 1 TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

Firda Amalia Zumrudah

Hendra Sukmana S.A.P., M.KP

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan mengimplementasi kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam sistem PPDB menggunakan 4 jalur (zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas orangtua). Metode penelitian ini menggunakan Kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi lapangan dan dokumentasi. Informan penelitian antara lain Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan dan ketua panitia PPDB, Waka Kurikulum dan Walimurid SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah tipe analisis kualitatif mengacu pada teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem PPDB Di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terimplementasi sebagaimana mestinya yaitu: 1) Implementasi kebijakan sistem PPDB ditinjau dari jenisnya dapat dikatakan sesuai dengan kondisi dilapangan, sebagai berikut : a) Komunikasi, sistem PPDB berjalan sesuai prosedur Peraturan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dan juga Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. b) Sumberdaya yang telah disiapkan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB. c) Disposisi, dalam Implementasi kebijakan upaya menghilangkan *deskriminasi* pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu disamaratakan, sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana secara umum sudah baik. d) Struktur Birokrasi, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik, mulai sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil akhir PPDB yang akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Kendala Implementasi Kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah pendaftaran dan penerimaan PPDB dalam mengatasi permasalahan yang ada di implementasi Kebijakan Sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. a) Orangtua kurang memahami pendaftaran PPDB dengan menggunakan 4 Jalur. b) Kecamatan Tulangan Terdapat satu SMP Negeri sehingga menyebabkan SMP di Kabupaten kurang merata.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan menjadi kewajiban yang dilaksanakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan yang merata. Sebagaimana diatur dalam Reformasi Pendidikan berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang khususnya dalam masa mudanya memerlukan Pendidikan dan pengajaran”. Dalam konteks kesetaraan dan keadilan bidang pendidikan, maka seluruh masyarakat baik laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan. Dengan kesadaran pentingnya pendidikan, maka pemerintah mewajibkan warganya untuk mengenyam pendidikan. Proses penerimaan siswa merupakan elemen penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di negara Indonesia proses penerimaan siswa menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB merupakan suatu proses pendaftaran siswa baru yang menggunakan sistem khusus yang dirancang oleh sumber atau pusat informasi sebagai server atau pengelola untuk menyeleksi penerimaan siswa baru.

PPDB dilaksanakan untuk pendaftaran sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sistem PPDB dilaksanakan secara online dan bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendaftaran secara cepat dan transparan, membuat seleksi siswa baru lebih praktis dan efisien serta menyediakan database sekolah yang akurat. Memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat. Sistem PPDB online telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada otoritas publik dan administrasi di berbagai wilayah Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur salah satunya Kabupaten Sidoarjo proses penerimaan siswa barunya telah menerapkan sistem PPDB secara online khususnya untuk sekolah tingkat menengah pertama. Sistem PPDB sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 pasal 12 ayat 2 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan 4 jalur yaitu jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 pasal 13 menjelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua paling banyak 5% dari daya tampung sekolah dan jalur prestasi 30% (prestasi nilai akademik 80% dan prestasi hasil lomba 20%). Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berlaku dalam tahun ajaran 2021/2022. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah memastikan tidak ada kendala server pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dikarenakan dalam pelaksanaannya Sekolah Menengah Pertama sudah bekerja sama dengan seluruh sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo terkait informasi dan tatacara atau prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru online yang dapat diakses melalui website Penerimaan Peserta Didik Baru kabupaten Sidoarjo (ppdbnda.net). Hal ini dilakukan agar orang tua siswa dan calon siswa dapat memahami tata cara penerimaan siswa baru secara online dan bersekolah di sekolah negeri menengah pertama sesuai yang mereka inginkan di Kabupaten Sidoarjo

Pernyataan Penelitian (Rumusan Masalah)

1.

- Bagaimana Implementasi kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo

2.

- Kendala apa yang dihadapi dalam Implementasi kebijakan sistem PPDB SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Saryono (2010), Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Karena peneliti melihat adanya indikasi masalah yang ditemukan saat penelitian terkait banyak wali murid dan didik baru yang masih belum memahami proses pendaftaran dengan menggunakan 4 jalur antarlain jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua.

Dalam penentuan informan merupakan selaku narasumber yang dipergunakan untuk memahami permasalahan yang diteliti, ketersediaan untuk memberikan sebuah informasi secara jelas, teliti dan akurat dan untuk memenuhi data.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan sasaran informan yakni Kepala Sekolah selaku *key informan*, Waka Kesiswaan dan ketua panitia PPDB selaku *Informan*, Waka Kurikulum selaku *Informan* dan Walimurid SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo selaku *informan*.

Jenis dan sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Kebijakan Sistem PPDB SMPN 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana (Sekolah Dasar) sebelumnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diberikan sosialisasi kepada orangtua atau walimurid sebelum saat Ujian Nasional berlangsung. Di dalam sosialisasi tersebut memberi informasi mengenai jalur yang ada di penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan 4 jalur antarlain jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orangtua. Pihak pelaksana menjelaskan prosedur atau tata cara untuk mendaftar secara mandiri disistem layanan <https://smp-ppdbsidoarjo.net> dan apabila orangtua atau peserta didik baru tidak bisa mendaftar secara mandiri pihak pelaksana (Sekolah Dasar) sebelumnya menyediakan tempat dan bersedia membantu untuk mendaftarkan peserta didik baru di layanan web <http://smp-ppdbsidoarjo.net>.

Sumberdaya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pelaksana kebijakan. Sumber daya di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sangat mendukung terhadap sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pihak pelaksana sudah menyiapkan secara matang dan Banyak sekali yang terlibat dalam sumber daya salah satunya Kepala Sekolah, panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB), anggota Osis, tenaga pendidik, pihak koperasi dan lain-lainnya. Untuk anggaran pihak pelaksana (SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo) dalam penerimaan peserta didik baru diambil dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo langsung turun ke Lapangan untuk melakukan promosi ke Sekolah Dasar yang ada dikecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Disposisi

Menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Apabila para pelaksana ingin mengimplementasi berjalan efektif dan efisien maka harus memahami dan bersedia untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanakan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah mempersiapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari administrasi, kepanitian penerimaan peserta didik baru, sarana dan prasarana sesuai dengan harapan para pelaksana (SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo) dan semua yang terlibat mengerjakan sesuai dengan jobdesk masing-masing.

Struktur Birokrasi

Merupakan salah satu unsur dalam penerapan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo mampu dikomunikasikan dan dikoordinasi dengan baik mulai dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan atau pagu, sarana dan prasarana, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir PPDB sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

B. Kendala Penerapan Kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Orangtua kurang memahami pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menggunakan 4 jalur.

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru sangatlah penting bagi didik baru yang ingin mendaftarkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Di penerimaan peserta didik baru dalam pendaftaran menggunakan empat jalur yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021. Namun siswa/siswi dan walimurid masih banyak yang tidak memahami prosedur atau alur penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan 4 jalur ini. Maka pihak sekolah melaksanakan sosialisasi terhadap walimurid. Sosialisasi diberikan sebelum Ujian Nasional berlangsung. Bagi walimurid dan siswa/siswi sosialisasi yang diberikan pihak sekolah sangat berarti untuk membantu pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara mandiri. Namun pada realitanya walimurid dan didik baru masih kurang memahami alur atau prosedur penerimaan peserta didik baru. Terdapat wali murid yang belum memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Kecamatan Tulangan terdapat satu SMP Negeri sehingga menyebabkan penyebaran SMP Negeri di Kabupaten kurang merata.

Di jalur zonasi dalam PPDB ini terdapat pro dan kontra di masyarakat khususnya didik baru dan walimurid. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk menghilangkan deskriminasi pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia di samaratakan dan untuk menghilangkan sekolah favorit maupun sekolah non favorit. Kebijakan jalur zonasi berdasarkan sasaran calon peserta didik baru didalam wilayah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dan berdasarkan skor jarak kedektan tempat tinggal kesekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter. Selain itu, SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo juga termasuk golongan sekolah favorit yang sangat di idam-idamkan sebagian besar anak di Kecamatan Tulangan. Sedangkan untuk SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo sendiri juga satu-satunya SMP Negeri di Kecamatan Tulangan, jadi terkait dengan kebijakan pelaksanaan PPDB terkait zonasi juga dirasa terlalu kurang adil untuk para calon siswa yang rumahnya jauh dari SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan dirasa juga terlalu terburu-buru sehingga membuat orang tua atau wali murid seperti tidak siap untuk menerima kebijakan ini.

Temuan Penting Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan pada penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo, Masih banyak wali murid dan didik baru yang belum mengetahui secara jelas persyaratan yang ada di penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan 4 jalur (Jalur zonasi, Jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua) . wali murid dan didik baru hanya mengetahui 2 jalur yang ada di penerimaan peserta didik baru yaitu jalur zonasi dan jalur afirmasi.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui prosedur maupun persyaratan di penerimaan peserta didik baru sehingga walimurid dan didik baru dapat merasakan manfaat dari PPDB dengan menggunakan 4 jalur (Jalur zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan jalur Perpindahan Tugas Orangtua) dan diharapkan dapat mengetahui tentang persyaratan PPDB dengan menggunakan 4 jalur (Jalur zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan jalur Perpindahan Tugas Orangtua)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Implementasi Kebijakan Sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan menyandingkan dengan kenyataan di lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :1) Implementasi kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari jenisnya dapat dikatakan sesuai dengan kondisi dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari jenis Implementasi yang akan di jelaskan menurut teori Edward III sebagai berikut : a)Komunikasi yang dilakukan Pihak SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terkait sistem Progam Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan sesuai prosedur Peraturan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dan juga Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatem Sidoarjo. b) Sumberdaya yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo telah mempersiapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru. c) Disposisi : dalam Penerapan kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menghilangkan *deskriminasi* pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu disama ratakan dan untuk mempermudah calon peserta didik baru untuk mendapatkan akses layanan pendidikan sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana secara umum sudah baik. d) Struktur Birokrasi : Implementasi Kebijakan sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikooordinasikan dengan baik, mulai sosialisasi, persiapan, pelaksanaan PPDB, pengawasan dan pelaporan hasil akhir PPDB yang akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Kendala Implementasi Kebijakan sistem SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi masalah pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru dalam mengatasi permasalahan yang ada di Penerapan Kebijakan Sistem PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo. a sosialisasi yang diberikan kepada walimurid oleh pihak sekolah sebelumnya (Sekolah Dasar) hanya 1 kali saja sebelum ujian nasional berlangsung sehingga walimurid kurang memahami prosedur atau alur penerimaan peserta didik baru. b) Penerapan kebijakan jalur Zonasi masih belum diterima baik di masyarakat khususnya didik baru dan walimurid. Kebijakan jalur zonasi berdasarkan tempat tinggal kesekolah tujuan dengan kelipatan 100 meter. Namun SMP Negeri dikecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo hanya terdapat 1 SMP. SMP Negeri 1 Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan sekolah favorit yang sangat diidam-idamkan sebagian besar anak di Kecamatan Tulangan.

TERIMA KASIH